

# BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR: PENYERAPAN DAN PERMASALAHAN

PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Indeks kualitas infrastruktur nasional turun 10 peringkat sebesar 53 di tahun 2015 menjadi 63 tahun di tahun 2016

Index Component	Rank/138	Score	Trend	Distance from best	Expand
Global Competitiveness Index 1-7 (best)	41	4.5			
Subindex A: Basic requirements 1-7 (best)	52	4.8			
1st pillar: Institutions 1-7 (best)	56	4.1			
2nd pillar: Infrastructure 1-7 (best)	60	4.2			
3rd pillar: Macroeconomic environment 1-7 (best)	30	5.5			
4th pillar: Health and primary education 1-7 (best)	100	5.3			

Laporan WEF Tahun 2016-2017 indeks daya saing infrastruktur Indonesia 4,2 dibawah rata-rata indeks Asia Pasific 4,8



Country	Year	LPI Rank	LPI Score	Customs	Infrastructure	International shipments	Logistics competence	Tracking & tracing	Timeliness
Tanzania	2016	61	2.99	2.78	2.81	2.98	2.92	2.98	3.44
Rwanda	2016	62	2.99	2.93	2.62	3.05	2.87	3.04	3.35
Indonesia	2016	63	2.98	2.89	2.65	2.90	3.00	3.19	3.48
Vietnam	2016	64	2.98	2.75	2.70	3.12	2.88	2.84	3.50
Uruguay	2016	65	2.97	2.78	2.79	2.91	3.01	2.84	3.47
Argentina	2016	66	2.96	2.63	2.86	2.76	2.83	3.26	3.47
Jordan	2016	67	2.96	2.55	2.77	3.17	2.89	2.96	3.34

## Sasaran Pembangunan Infrastruktur dalam APBN Tahun 2017



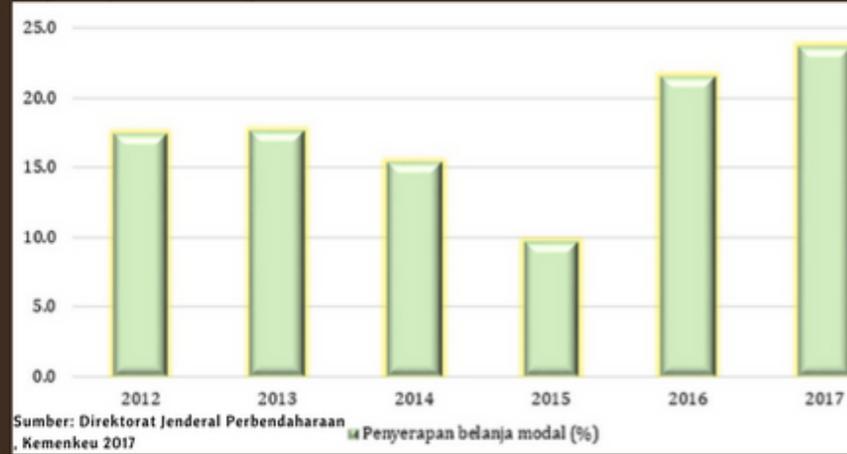
## Anggaran Infrastruktur dalam APBN Tahun 2015-2017

Uraian	APBNP 2015	APBNP 2016	APBN 2017
<b>I. Infrastruktur Ekonomi</b>	280.3	307.1	378.3
1. Melalui K/L	196.8	151.2	154.1
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	111.1	94.7	98.7
Kementerian Perhubungan	59.1	39.9	42.1
Kementerian Pertanian	8.9	4.1	2.3
Kementerian ESDM	8.1	3.7	3.3
2. Melalui Belanja BA BUN	6.8	5.9	2.6
VGF (termasuk Cadangan VGF)	1.2	1.1	0.3
Belanja Hibah	4.5	4.6	2.2
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	41	88	183.7
Dana Alokasi Khusus	29.7	66.3	32.3
Perkiraan Dana Desa untuk infrastruktur	8.3	18.8	24
Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur			124
4. Melalui Pembiayaan	35.7	62.1	37.8
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	5.1	9.2	9.7
Penyertaan Modal Negara	28.8	36.2	7.2
BLU LMAN		1.6	20
<b>II. Infrastruktur Sosial</b>	6.3	5.7	5.5
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.3	4.6	4.2
Kementerian Agama	2.1	1.2	1.2
<b>III. Dukungan Infrastruktur</b>	3.7	4.2	4
BPN	1.3	0.3	0.1
Kementerian Perindustrian	0.6	0.4	0.5
<b>Jumlah</b>	290	317.1	387.7

Agenda prioritas Pemerintah di tahun 2017 adalah percepatan pembangunan Infrastruktur Anggaran infrastruktur dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan

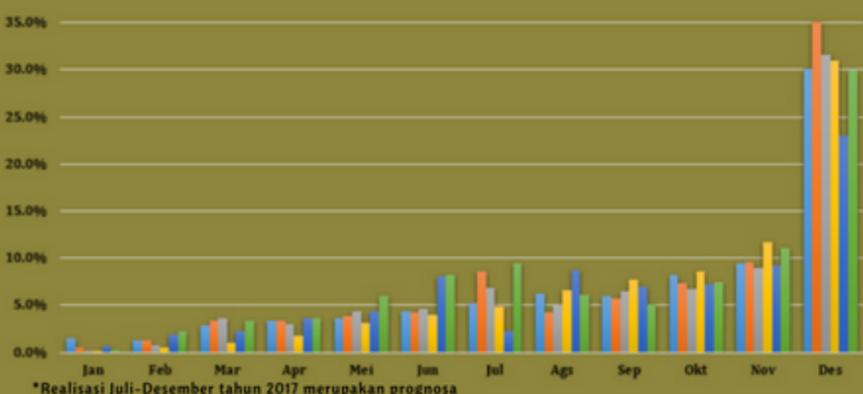
Penyerapan anggaran belanja modal Semester I tahun 2012-2017 mengalami fluktuatif

## Penyerapan Belanja Modal K/L Semester I Tahun 2012-2017



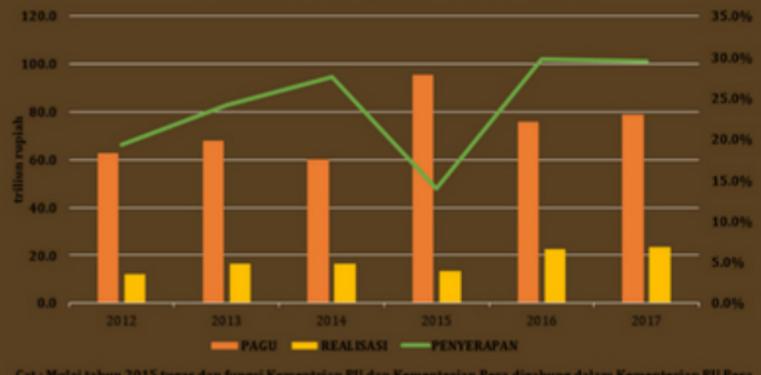
Penyerapan belanja modal semester I tahun 2017, masih tergolong rendah dan relatif sama dibanding tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 47,48 triliun atau sebesar 23,7%

## Penyerapan Belanja Modal K/L per Bulan Tahun 2012-2017(%)



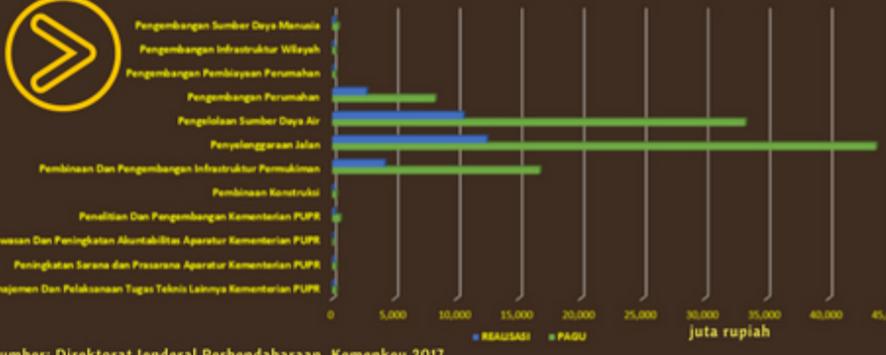
Rata-rata penyerapan anggaran belanja sangat rendah di awal tahun dan mulai mengalami peningkatan ditriwulan IV. Pola belanja belum mengalami perubahan signifikan. Diharapkan terjadi sebaran yang lebih merata, baik di semester I dan II agar tidak mengalami penumpukan di akhir tahun

## Realisasi Semester I Belanja Modal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2012-2017



Penyerapan anggaran belanja modal semester I tahun 2017 Kementerian PUPR tidak jauh berbeda dari tahun lalu sebesar Rp23,3 triliun atau 29,5 % dari pagu APBN yang ditetapkan

Kenaikan penyerapan di beberapa program didorong kebijakan pemerintah dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional



## Kendala Penyerapan

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran
2. Kendala dalam ketersediaan dan pembebasan lahan
3. Penerbitan Loan Agreement yang membutuhkan waktu cukup lama
4. Keterbatasan dan kemampuan SDM
5. Rumitnya proses perizinan

## Rekomendasi

1. Perencanaan dan pembangunan harus sejalan antara pemerintah pusat dan daerah
2. Pembentukan badan khusus lintas sektoral bidang infrastruktur
3. Mengoptimalkan SDM dengan pelatihan dan assesment sesuai kompetensi
4. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial kultural